

BAB 2

Landasan Teori

2.1 Persepsi

2.1.1 Pengertian Persepsi

Berkaitan dengan pengertian persepsi, Slameto (2003:102) mendefinisikan persepsi seperti berikut ini.

“Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya peran atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus melakukan hubungan dengan lingkungan yang dilakukan dengan menggunakan indra penglihatan, pendengaran, peraba dan penciuman.”

Sementara itu, Jalaluddin Rakhmat (2007:51) mengemukakan bahwa “persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”.

Pareek (dalam Alex Sobur, 2003:446) pun berpendapat mengenai pengertian persepsi. Dalam kaitan ini, Pareek menjelaskan bahwa “persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan, pancaindera atau data”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat dipahami bahwa seorang individu dituntut untuk mampu menanggapi dan mengamati berbagai peristiwa yang terjadi disekitarnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persepsi adalah cara manusia menangkap dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan sekitarnya.

2.1.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Jalaluddin Rakhmat (2007:51) memaparkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan turut menentukan terjadinya persepsi. Menurutnya, faktor-faktor tersebut mencakupi faktor fungsional/personal dan faktor struktural. Secara lebih rinci, berikut adalah penjelasannya.

Faktor fungsional/personal yang terdiri dari atas kebutuhan, pengalaman, masa lalu, motivasi, harapan, keinginan, perhatian, emosi, nilai, daya ingat dan suasana hati. Sementara itu, faktor struktural yang terdiri dari stimulus fisik dan efek-efek syaraf yang bekerja dalam sistem syaraf.

Alex Sobur (2003:452) pun mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi persepsi. Menurut Sobur, faktor-faktor tersebut terdiri atas (1) faktor intern yang terdiri dari kebutuhan psikologis, latar belakang, pengalaman, kepribadian, sikap dan kepercayaan umum, serta penerimaan diri; dan (2) faktor ekstern yang terdiri dari intensitas, ukuran, kontras, gerakan, ulangan, keakraban, dan sesuatu yang baru.

Krech (dalam Sobur, 2003:477) juga mengemukakan pendapatnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Krech berpendapat bahwa persepsi ditentukan oleh empat faktor, yakni (1) fisik dan lingkungan sosialnya, (2) struktur fisiologisnya, (3) kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuannya, dan (4) pengalaman-pengalaman masa lalunya.

Sehubungan dengan beberapa penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi diatas, dapat dipahami bahwa walaupun stimulus yang berbeda-beda yang sampai kepada kita tentang masalah yang sama, apa yang bisa

kita hayati adalah terbatas pada saat-saat tertentu yakni tergantung pada stimulus, tetapi juga pada proses kognitif yang merefleksikan tujuan, dan harapan seseorang pada saat itu.

2.1.3 Prinsip-prinsip Persepsi

Slameto (2003:103) mengemukakan pendapatnya mengenai beberapa prinsip dasar persepsi. Menurutnya, berikut ini adalah prinsip-prinsip persepsi tersebut.

1) Persepsi itu relatif bukan absolut

Individu bukanlah instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala sesuatu persis seperti keadaan sebenarnya.

2) Persepsi itu selektif

Individu hanya memperlihatkan beberapa rangsangan dari banyak rangsangan yang ada di sekitarnya pada saat-saat tertentu. Ini berarti bahwa rangsangan yang timbul berdasarkan dari pengalaman atau sesuatu yang telah dipelajari.

3) Persepsi itu memiliki tatanan

Individu menerima rangsangan dari luar tidak sembarangan, karena akan selektif menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok-kelompok. Jika rangsangan yang datang tidak lengkap, akan melengkapinya sendiri sehingga hubungan itu menjadi jelas.

4) Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan

Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih tersebut akan ditata dan demikian pula bagaimana pesan tersebut akan diinterpretasikan.

Persepsi individu atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi individu atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individual, kepribadian, sikap dan motivasi.

Dari berbagai uraian diatas, diketahui bahwa dalam menyusun berbagai hal di dalam pikiran kita menjadi suatu gambaran yang membentuk keseluruhan yang berarti. Apapun persepsinya, hal itu merupakan pengalaman yang utuh.

2.2 Mahasiswa Akuntansi

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) edisi keempat (2008), mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di Perguruan Tinggi. Sementara itu, akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi (AICPA). Jadi, yang dimaksud dengan mahasiswa akuntansi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi yang telah mempelajari mata kuliah audit dan mata kuliah kependidikan dan Prodi Akuntansi yang telah mempelajari mata kuliah etika dan profesi bisnis dan mata kuliah audit di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia.

2.3 Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja di bidang pendidikan akuntansi dan tugasnya melakukan penelitian serta pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Seseorang berhak menyandang gelar akuntan bila telah memenuhi syarat, di

antaranya yaitu pendidikan sarjana jurusan akuntansi dari Fakultas Pendidikan Ekonomi Perguruan Tinggi yang telah diakui menghasilkan gelar akuntan atau perguruan tinggi swasta yang berafiliasi ke salah satu perguruan tinggi yang telah berhak memberikan gelar Akuntan (IAI).

Sedangkan menurut Sugiri dan Riyono dalam Dewi Sartika (2006) adalah profesi akuntan yang menghasilkan akuntan-akuntan baru yang profesional, selain mengajar akuntan pendidik ini melakukan pengabdian masyarakat dan penelitian di bidang Akuntansi

Melengkapi pengertian diatas berkaitan dengan pendidik, menurut SUB Koordinator MKDP Landasan Pendidikan UPI (2007:224) pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 menyebutkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi.

Maka dari beberapa pengertian diatas, definisi akuntan pendidik dalam penelitian ini adalah dosen akuntansi yang mengajar di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

2.4 Etika

2.4.1 Pengertian Etika

Ernawan (2007: 1-2) memaparkan bahwa secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu *ethos* dan dalam bentuk jamaknya yaitu *ta etha*. “*Ethos*” yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat. Kata ini identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata latin “*mos*” yang dalam bentuk jamaknya *Mores* yang berarti juga adat atau cara hidup.

Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Etika dan moral memiliki arti yang sama, namun dalam pemakaian sehari-harinya ada sedikit perbedaan. Moral biasanya dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai/dikaji (dengan kata lain perbuatan itu dilihat dari dalam diri orang itu sendiri), artinya moral disini merupakan subjek sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada dalam kelompok atau masyarakat tertentu (merupakan aktivitas atau hasil pengkajian).

Etika merupakan cabang dari filsafat etika mencari ukuran baik buruknya bagi tingkah laku manusia. Etika hendak mencari tindakan manusia yang manakah yang baik. Etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat seperti antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan ilmu hukum. Perbedaannya terletak pada aspek keharusan (*ought*). Perbedaannya dengan teologi moral karena tidak

bersandarkan pada kaidah-kaidah keagamaan, tetapi hanya terbatas pada pengetahuan yang dihasilkan dari tenaga manusianya sendiri. Kata moral ini dalam bahasa Yunani sama dengan *ethos* yang menjadi etika.

Jadi secara etimologis, etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk, yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Pada hakikatnya, moral menunjuk pada ukuran-ukuran yang telah diterima oleh sesuatu komunitas sementara etika umumnya lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan di berbagai wacana etika, atau dalam aturan-aturan yang diberlakukan bagi suatu profesi.

Lebih lanjut, Ernawan (2007: 3) menyimpulkan pengertian etika. Menurutnya, etika merupakan suatu cabang ilmu filsafat, tujuannya adalah mempelajari perilaku, baik moral maupun immoral, dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi yang memadai yang tentunya dapat diterima oleh suatu golongan tertentu atau individu.

Menurut Suseno dan Keraf (1989 dan 1991 dalam Ernawan, 2007:3), untuk memahami etika perlu dibedakan dengan moralitas. Moralitas adalah suatu sistem nilai tentang bagaimana seseorang harus berperilaku sebagai manusia. Sistem nilai ini terkandung dalam ajaran-ajaran, moralitas memberi manusia aturan atau petunjuk konkrit tentang bagaimana harus hidup, bagaimana harus bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik, dan bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Sementara itu, etika berbicara

mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Sehubungan dengan pengertian etika, Maryani dan Ludigdo (2001) menyebutkan bahwa etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi.

Pengertian etika menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) edisi keempat (2008) adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sementara itu, Arens, Elder dan Beasley (2004:110) mengemukakan bahwa etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian nilai tersebut, walaupun kita memperhatikan atau tidak memperhatikannya secara eksplisit.

2.4.2 Fungsi Etika

Berkaitan dengan fungsi etika, Nurjahrah (2010) menyebutkan bahwa terdapat tiga fungsi etika, yaitu sebagai berikut ini.

- 1) Sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan.
- 2) Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis.
- 3) Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralism.

2.4.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Pelanggaran Etika

Faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran etika menurut Nurjannah (2010) di antaranya mencakupi lima faktor, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kebutuhan Individu.
- 2) Tidak ada pedoman.
- 3) Perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tak dikoreksi.
- 4) Lingkungan yang tidak etis.
- 5) Perilaku dari komunitas.

Sehubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran etika, Ernawan (2007: 124) juga mengemukakan beberapa alasan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota profesi. Alasan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Kurangnya jaminan kesejahteraan yang bisa menyebabkan ia melanggar kode etik yang sudah ada.
- 2) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman seorang professional mengenai substansi dari kode etik profesi yang bersangkutan.
- 3) Kode etik mengandung idealisme yang kadangkala berseberangan dengan fakta yang ada di sekitar kaum profesional.
- 4) Tidak ada pengaturan mengenai sanksi yang tegas dalam kode etik tersebut.

2.4.4 Jenis-jenis Etika

Menurut Keraf (2001: 33-35), etika dibagi dalam etika umum dan etika khusus. Etika khusus dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu: etika individual, etika lingkungan hidup dan etika sosial. Etika sosial berbicara mengenai kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesama. Karena etika sosial menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia. Ia menyangkut hubungan individual antara orang yang satu dengan orang yang lain, serta menyangkut interaksi sosial secara bersama. Etika sosial mencakup etika profesi dan di dalamnya terdapat etika bisnis. Etika profesi lebih menekankan

kepada tuntutan terhadap profesi seseorang, dimana tuntutan itu menyangkut tidak saja dalam hal keahlian, melainkan juga adanya komitmen moral : tanggung jawab, keseriusan, disiplin, dan integritas moral.

2.4.5 Aturan Etika Profesi Akuntansi IAI

Menurut Nurjahrah (2010), kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, lebih lanjut Nurjahrah memaparkan bahwa terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.
- 2) Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
- 3) Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
- 4) Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Kode Etik Akuntan sebagaimana ditetapkan dalam kongres X Ikatan Akuntansi Indonesia di Jakarta pada tahun 2007 terdiri atas tiga hal, yaitu sebagai berikut.

- 1) Prinsip Etika
- 2) Aturan Etika

3) Interpretasi Aturan Etika.

Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota sedangkan aturan etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Mengenai prinsip etika menurut Mulyadi (2002:53), prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa oleh anggota. Prinsip etika disahkan kongres IAI dan berlaku bagi seluruh anggota IAI. Adapun Prinsip Etika menurut IAI (1998) terdiri dari delapan prinsip, yaitu: tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian professional; kerahasiaan, perilaku professional, dan standar teknis.

Secara lebih jelas, berikut adalah pemaparan kedelapan prinsip etika tersebut.

(1) Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran

penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka.

Dalam “*Auditing dan Pelayanan Verifikasi (Edisi Kesembilan)*”, Arens, Elder, dan Beasley (2004:122) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus berusaha menjadi profesional yang peka serta memiliki pertimbangan moral atas seluruh aktivitas mereka. Dalam kaitan ini, prinsip tanggung jawab tersebut tidak hanya kepada pemakai jasa, tetapi juga terhadap teman seprofesi, kepada publik dan juga terhadap tuhan.

Ernawan (2007: 126) pun menyebutkan bahwa salah satu prinsip etika profesi adalah tanggung jawab. Menurutnya, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan berdasarkan standar profesi bertujuan agar hasil yang dicapai efektif dan efisien serta dampaknya terhadap kehidupan orang lain.

(2) Kepentingan Publik

Menurut Boynton (2002:102), profesi akuntan dalam melayani kepentingan publik, para anggota harus menunjukkan perilaku dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan prinsip-prinsip etika. Kepentingan publik ini penting karena kepercayaan yang diberikan publik akan mempengaruhi kredibilitas profesi.

Pendapat di atas tampaknya sejalan dengan pernyataan Arens, Elder, dan Beasley (2004:122) yang menjelaskan bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan publik, para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak

sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme.

Seperti yang dikemukakan oleh Ernawan (2007: 126), salah satu prinsip etika profesi adalah keadilan. Prinsip keadilan ini tampaknya berkaitan dengan prinsip kepentingan publik. Menurutnya, adil pada hakikatnya adalah saat kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Prinsip ini mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan, serta menghargai martabat dan milik orang lain.

Dalam menjalankan prinsip etika, kepentingan publik, harus juga dilandasi sikap yang baik. Ernawan (2007: 126) berpendapat bahwa sikap baik merupakan prinsip dasar etika. Prinsip sikap baik mendasari semua norma moral. Menurutnya, hendaknya kita bernada positif dengan berbuat baik dengan memulai dengan kegiatan-kegiatan yang merupakan awal kesejahteraan, terutama pada masyarakat.

(3) Integritas

Seorang akuntan dalam menjalankan pekerjaannya tentu harus memiliki integritas. Boynton (2002:103) menyebutkan bahwa integritas merupakan karakteristik pribadi yang tidak dapat dihindari dalam diri seorang akuntan. Integritas menunjukkan tingkat kualitas yang menjadi dasar kepercayaan publik. Elemen ini menjadi tolak ukur setiap anggota untuk mempertimbangkan semua keputusan yang dibuat dalam setiap penugasannya.

Sehubungan dengan prinsip integritas, Arens, Elder, dan Beasley (2004:122) mengemukakan bahwa untuk mempertahankan dan memperluas keyakinan publik, para anggota harus menunjukkan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi.

(4) Obyektivitas

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2004:122), dalam prinsip obyektivitas, anggota harus mempertahankan obyektivitas dan terbebas dari konflik antarkepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Sementara itu, menurut pendapat Boynton (2002:103), kepatuhan akan prinsip obyektivitas akan semakin meningkat bila para anggota menjauhkan diri dari keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.

(5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Boynton (2002:103) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi dan kehati-hatian profesional adalah pusat dari pencarian terus menerus akan kesempurnaan dalam melaksanakan jasa profesional. Kompetensi adalah hasil dari pendidikan dan pengalaman sedangkan kehati-hatian profesional adalah keteguhan, kesungguhan untuk bersikap energik dalam menerapkan dan mengupayakan pelaksanaan jasa.

(6) Kerahasiaan

Arens, Elder, dan Beasley (2004:137) memaparkan bahwa sangatlah penting bahwa praktisi (dalam hal ini profesi akuntan) tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari segala jenis penugasan tanpa persetujuan klien. Hal tersebut menjadi sangat penting, karena seorang akuntan profesional

yang banyak memperoleh informasi rahasia mengenai kliennya tentu harus dapat menjaga kerahasiaan tersebut dengan sebaik-baiknya atau tidak membocorkan informasi yang rahasia itu kepada pihak lain yang tidak berkepentingan agar klien tetap merasa nyaman dan tidak merasa dirugikan.

(7) Perilaku Profesional

Berkaitan dengan perilaku profesional, menurut Arens, Elder, dan Beasley (2004:117), seorang profesional diharapkan dapat mengarahkan dirinya pada suatu tingkat tindakan di atas tingkat tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Sebagai contoh, ketika pers memberitakan bahwa seorang dokter, biarawan, senator, atau akuntan publik didakwa telah melakukan suatu kejahatan, mayoritas masyarakat akan merasa lebih kecewa daripada jika hal yang sama terjadi pada seseorang yang tidak dicap sebagai seorang profesional.

Lebih lanjut, Arens, Elder, dan Beasley (2004: 117-118) menjelaskan bahwa istilah profesional menunjukkan tanggung jawab untuk bertindak melebihi kepuasan yang dicapai oleh si professional itu sendiri atas pelaksanaan tanggung jawab yang diembannya maupun melebihi ketentuan yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

Alasan utama diperlukannya tingkat tindakan profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang masing-masing individu yang menyediakan layanan tersebut. Keyakinan publik pada kualitas dari jasa profesional akan semakin besar ketika profesional menunjukkan standar kinerja yang tinggi serta bertindak sebagai bagian dari seluruh praktisi.

Sementara itu, Ernawan (2007: 120) menyebutkan bahwa orang yang profesional adalah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, menggunakan seluruh waktunya untuk pekerjaannya, hidup serta bangga terhadap pekerjaannya. Di sini seorang profesional harus peka terhadap kepentingan pihak-pihak yang ada di sekitarnya sehingga akan menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat secara umum dan kepentingan professional itu sendiri. Berkaitan dengan prinsip etika yakni profesional, Ernawan (2007: 120) memaparkan bahwa setidaknya terdapat tujuh ciri seorang yang dianggap profesional, yaitu sebagai berikut.

- 1) Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu karena menyangkut kepentingan masyarakat seluruhnya yang bersangkutan paut dengan nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup umat manusia. Biasanya wujud dari izin ini berupa pengucapan janji mereka di muka umum untuk member bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan dan dalam bentuk sertifikat untuk berpraktek.
- 2) Memiliki pengetahuan atau kecakapan khusus, kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka dalam membaca situasi dimana tidak dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Keahlian dan keterampilan yang dimilikinya biasanya dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bekerjanya selama bertahun-tahun.
- 3) Memiliki kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Pada setiap profesi umumnya ditemukan adanya suatu aturan dalam mengemban profesinya tersebut, biasanya disebut kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh semua anggota profesi yang bersangkutan.
- 4) Otonomi dalam penyediaan jasanya dan sifatnya tetap dan terus menerus, menekuni pekerjaannya. Di sini dituntut kemampuan untuk mengelola perencanaan program dengan jelas, strategis, dan mandiri.
- 5) Mempunyai sikap yang berorientasi ke depan dan bersifat terbuka sehingga mampu mengantisipasi dan siap menghadapi segala perubahan karena perkembangan zaman.
- 6) Menjadi anggota dari suatu organisasi profesi tertentu yang pelaku-pelakunya sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku dan saling mendisiplinkan karena melanggar standar keahlian dan keterampilan itu. Organisasi profesi ini bertujuan untuk memajukan profesi serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan mengandung komponen intelektual yang dominan.

- 7) Keahlian dan keterampilan yang dimilikinya diabdikan untuk melayani masyarakat terutama karena proses modernisasi. Hal ini juga karena tidak semua anggota masyarakat memiliki keahlian yang bersangkutan.

Kanter (dalam Ernawan, 2007:121) pun menjelaskan bahwa beberapa kunci untuk menetapkan dan mempertahankan kepercayaan klien terhadap kaum profesional, yaitu sebagai berikut.

- 1) Agar dapat dipercaya, kaum profesional harus membuat kepentingan klien menjadi kepentingan mereka. Dalam hal ini, profesional merupakan pihak yang dipercaya, maka profesional harus dapat mengarahkan tindakannya demi kebaikan klien agar pantas mendapatkan kepercayaan klien.
- 2) Kesiediaan bertindak juga perlu untuk mendapatkan kepercayaan.
- 3) Kesiediaan itu haruslah terbuka dan kontinu, bukan hanya dalam jangka waktu terbatas, tetapi selama dibutuhkan.
- 4) Kaum profesional harus kompeten.
- 5) Profesional juga harus dapat menuntut dari klien tingkat pertanggungjawaban dan disiplin diri.
- 6) Kaum profesional yang dapat dipercaya harus memiliki kebebasan untuk memperhatikan kebaikan masing-masing klien dengan bijaksana, meninjau kesanggupan, pengaturan waktu serta energy jika upaya itu mengakibatkan pelayanan yang lebih baik bagi klien secara keseluruhan.
- 7) Kaum profesional harus mempunyai rasa tanggung jawab dengan penuh kesadaran.

(8) Standar Teknis

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2004: 122), seorang akuntan harus selalu memperhatikan standar teknis dan etika profesi, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Hal ini bertujuan agar akuntan senantiasa bertindak sesuai dengan kode etik yang berlaku sehingga dalam setiap menjalankan tugasnya, akuntan tersebut tidak merugikan pihak lain, baik pihak klien, rekan, maupun masyarakat secara umum.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap etika akuntan pendidik yang dilihat dari persepsi mahasiswa pernah dilakukan oleh Fanita Meilisa dan Unti Ludigdo (2010) dengan judul penelitian “Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Akuntan Pendidik di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut mahasiswa, akuntan pendidik telah menerapkan delapan prinsip etika dengan urutan prinsip yang dilaksanakan dari paling baik, dengan total jawaban sangat setuju dan setuju dari masing-masing prinsip, yakni standar teknis (79,2%), kompetensi dan kehati-hatian professional (76,9%), integritas (73,6%), kerahasiaan (68,8%), kepentingan publik (67,73%), obyektivitas (64,8%), perilaku professional (60,66%), dan tanggung jawab profesi (58,08%).

Hasil penelitian itu juga memperlihatkan bahwa walaupun secara umum akuntan pendidik telah memiliki etika yang baik tetapi menurut mahasiswa terdapat beberapa bentuk perilaku tidak etis yang masih dilakukan oleh akuntan pendidik. Lima urutan teratas bentuk perilaku tidak etis yang dilakukan di antaranya (1) merokok di ruang kelas saat perkuliahan berlangsung (21,43%); (2) menjatuhkan mahasiswa yang “kurang” di depan umum dan tidak untuk tujuan mendidik (14,94%); (3) membicarakan aib/informasi rahasia dosen lain (14,29%); (4) mengganti perkuliahan yang pernah ditinggalkan tanpa peduli dengan jadwal mahasiswanya (9,74%); (5) memberikan nilai tanpa transparansi/tidak obyektif (9,09%).

Melalui penelitiannya yang berjudul “Persepsi Dosen Akuntansi dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Akuntansi”, Dewi Sartika (2006) juga memotret objek penelitian yang berkaitan dengan etika. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi dosen Akuntansi dan mahasiswa Akuntansi terhadap kode etik akuntan. Hal itu terlihat dari mean kedua kelompok tersebut. Mean dosen Akuntansi (70,67) memiliki persepsi sedikit lebih baik dibandingkan dengan mean mahasiswa Akuntansi (68,63). Dewi Sartika lebih lanjut mengemukakan bahwa fakta tersebut ada karena dosen Akuntansi lebih banyak memiliki pengalaman dibandingkan dengan mahasiswa Akuntansi mengenai kode etik akuntan. Selanjutnya mengenai muatan etika dalam kurikulum akuntansi Berdasarkan pendapat responden mengenai cakupan muatan etika dalam kurikulum akuntansi pada perguruan tinggi di Kota Bengkulu. Pada mata kuliah khusus akuntansi, mata kuliah Auditing menempati urutan teratas, kemudian disusul dengan mata kuliah Teori Akuntansi dan Perpajakan. Dari 112 responden, 93 (83%) responden menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi akuntansi yang ada sekarang belum cukup memberikan bekal etika bagi mahasiswa untuk terjun ke dunia bisnis/kerja, dan 19 (17%) responden lainnya menjawab sudah. Atas ketidakcukupan muatan etika dalam kurikulum pendidikan tinggi akuntansi sekarang maka sebagian besar responden mengusulkan untuk dipeluas dengan menyajikan secara terpisah sebagai mata kuliah tersendiri.

Penelitian oleh Sihwahjoeni dan Gudono (2000) yang meneliti mengenai persepsi dari tujuh kelompok akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan pendidik

sekaligus akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik sekaligus akuntan manajemen, akuntan pemerintahan, akuntan pendidik sekaligus akuntan pemerintahan, mengenai kode etik akuntan menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan di antara ketujuh kelompok akuntan tersebut terhadap kode etik akutan. Di antara kelompok profesi akuntan tersebut mempunyai persepsi yang sama positifnya terhadap kode etik akuntan.

Penelitian oleh Dania (2001) dalam Jaka Jaka Winarna dan Ninuk Retnowati (2003) mengenai pengaruh pendidikan etika profesi akuntan terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi tentang kode etik akuntan Indonesia yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan mengenai kode etik akuntan antara Mahasiswa Akuntansi yang belum dengan yang sudah memperoleh pendidikan etika profesi akuntan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa mata kuliah Auditing sangat berpengaruh terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi tentang kode etik akuntan.

Penelitian oleh Purnamasari (2002) tentang persepsi akuntan dan Mahasiswa Akuntansi terhadap kode etik akuntan Indonesia yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan diantara responden tersebut terhadap kode etik akuntan Indonesia. Penelitian oleh Wulandari dan Sri Sularso (2002) yang meneliti persepsi akuntan pendidik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia menunjukkan terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pendidik dan Mahasiswa Akuntansi. Akuntan pendidik mempunyai persepsi yang lebih baik terhadap kode etik akuntan dibandingkan dengan Mahasiswa Akuntansi.

Berdasarkan argumen di atas, maka peneliti mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fanita Meilisa dan Unti Ludigdo di Universitas Brawijaya. Penelitian yang saat ini dilakukan merupakan penelitian yang berhubungan dengan etika akuntan pendidik namun memiliki sedikit perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanita Meilisa dan Unti Ludigdo tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian komparasi karena bertujuan juga untuk mengetahui persamaan atau perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dari Program Studi (Prodi) yang berbeda terhadap etika akuntan pendidik. Oleh karena itulah, penelitian terhadap etika akuntan pendidik ini dilakukan dengan cara membandingkan antara persepsi mahasiswa dari Prodi Pendidikan Akuntansi dengan mahasiswa dari Prodi Akuntansi.

2.6 Kerangka Pemikiran

Arens, Elder, dan Beasley (2004: 110) mengemukakan bahwa perilaku beretika wajib hukumnya supaya masyarakat dapat berjalan secara teratur. Etika adalah sejenis perekat yang dapat mengikat erat masyarakat. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa persoalan etika sangat penting bagi setiap manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Hal itu disebabkan oleh wujud etika manusia yang dapat terlihat dari perilakunya di mata masyarakat.

Yatimin (2005:4) menjelaskan bahwa istilah etika menurut bahasa (etimologi) “berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti adat istiadat (kebiasaan), perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan”. Sementara itu, menurut istilah terminologi, Asmaran AS dalam Yatimin (2005:8),

mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai-nilai perbuatan baik atau buruk, sedangkan ukuran untuk menetapkan nilainya adalah akal pikiran manusia.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat dinilai bahwa kedudukan etika yang teramat dasar dalam setiap kehidupan masyarakat. Begitupun dalam sebuah profesi yang diemban seseorang. Sebuah profesi tentu harus dapat melayani masyarakat serta memiliki etika yang baik agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat.

Jika suatu profesi tidak menerapkan atau memiliki etika saat ia bekerja, maka masyarakat akan memberikan citra negatif kepada para profesi yang bersikap tidak etis tersebut. Selanjutnya, kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut dapat juga hilang sehingga pada akhirnya tidak ingin menggunakan jasanya kembali.

Dalam kaitan ini, permasalahan etika profesi pun dapat terkait dengan profesi akuntan pendidik. Akuntan pendidik bekerja pada sebuah lingkup pendidikan, yakni perguruan tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan pendidikan merupakan lingkungan yang sangat kental dengan nuansa etika dan moral. Hal ini tentunya mengharuskan seorang akuntan pendidik untuk menerapkan dan melaksanakan etika dalam pekerjaan yang dijalankannya.

Lembaga pendidikan berperan sebagai produsen yang memberi output berupa sumber daya manusia kepada masyarakat. Warna yang diberikan oleh dunia pendidikan akan ikut mewarnai perilaku masyarakat. Oleh karena itu

pembangunan dunia pendidikan yang etis dan bermoral menjadi sangat penting bagi profesi.

Salah satu elemen dari dunia pendidikan adalah dosen atau akuntan pendidik. Akuntan pendidik menjadi elemen yang teramat penting dalam kegiatan produksi dunia pendidikan. Akuntan pendidiklah yang membibit serta memupuk mahasiswa agar menjadi *output* yang baik, beretika, dan bermoral. Bagaimana jadinya jika seorang akuntan pendidik tidak menerapkan serta melaksanakan etika saat ia bekerja, tentunya hal itu akan berakibat besar terhadap output-output dunia pendidikan yang akan melakukan hal yang sama setelah ia selesai dari pendidikannya.

Sebagian besar profesi mempunyai kode etik yang digunakan sebagai kontrol bagi anggotanya untuk bersikap dan berperilaku etis. Demikian juga untuk profesi dosen atau pendidik. Namun untuk kode etik akuntan pendidik tidak demikian. Kode etik yang berlaku saat ini adalah kode etik IAI yang menitik beratkan pada akuntan publik serta akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Karena akuntan pendidik tidak memiliki aturan etika yang khusus maka etika tersebut diukur melalui delapan prinsip umum etika profesi.

Mengenai prinsip etika menurut Mulyadi (2002:5), prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa oleh anggota. Prinsip etika disahkan kongres IAI dan berlaku bagi seluruh anggota IAI. Oleh karenanya dalam penelitian ini indikator etika akuntan pendidik akan mengacu pada prinsip tersebut. Adapun Prinsip Etika menurut IAI (1998) terdiri dari delapan prinsip, yaitu: tanggung jawab profesi, kepentingan

publik, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian professional; kerahasiaan, perilaku professional, dan standar teknis.

Untuk mengetahui penerapan prinsip etika oleh akuntan pendidik, peneliti menggunakan persepsi mahasiswa akuntansi. Slameto (2003:102) mengatakan bahwa Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya peran atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus melakukan hubungan dengan lingkungan yang dilakukan dengan menggunakan indra penglihatan, pendengaran, peraba dan penciuman.

. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) edisi keempat (2008), definisi persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Sementara itu, menurut Ludigdo dan Machfoedz (1999:4), persepsi etika dalam konteks penelitian merupakan tanggapan atau penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa moral tertentu melalui proses penentuan yang kompleks. Proses penentuan kompleks tersebut berhubungan dengan penyeimbangan pertimbangan baik dari sisi dalam ataupun luar yang disifati oleh kombinasi unik dari pengalaman dan pembelajaran dari masing-masing individu, sehingga individu dapat memutuskan tentang tindakan atau pikiran yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya akuntan pendidik bertugas untuk membimbing serta memupuk mahasiswa agar menjadi *output* yang baik, beretika, dan bermoral. Dengan demikian, akan tepat menjadikan persepsi mahasiswa sebagai objek penelitian untuk mengetahui penerapan etika oleh para akuntan pendidik karena antara mahasiswa dan akuntan pendidik atau dosen akuntansi jelas keduanya selalu berinteraksi.

Mengenai mahasiswa menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) edisi keempat (2008), mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi. Menurut Yatimin (2005:53), mahasiswa juga dapat dikatakan sebagai anak didik. Anak didik adalah manusia yang mempunyai potensi untuk digali dan dikembangkan sehingga tumbuh daya kekuatan yang dapat membawa kepada kedewasaan. Jadi, yang dimaksud mahasiswa akuntansi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi dan Program Studi Akuntansi.

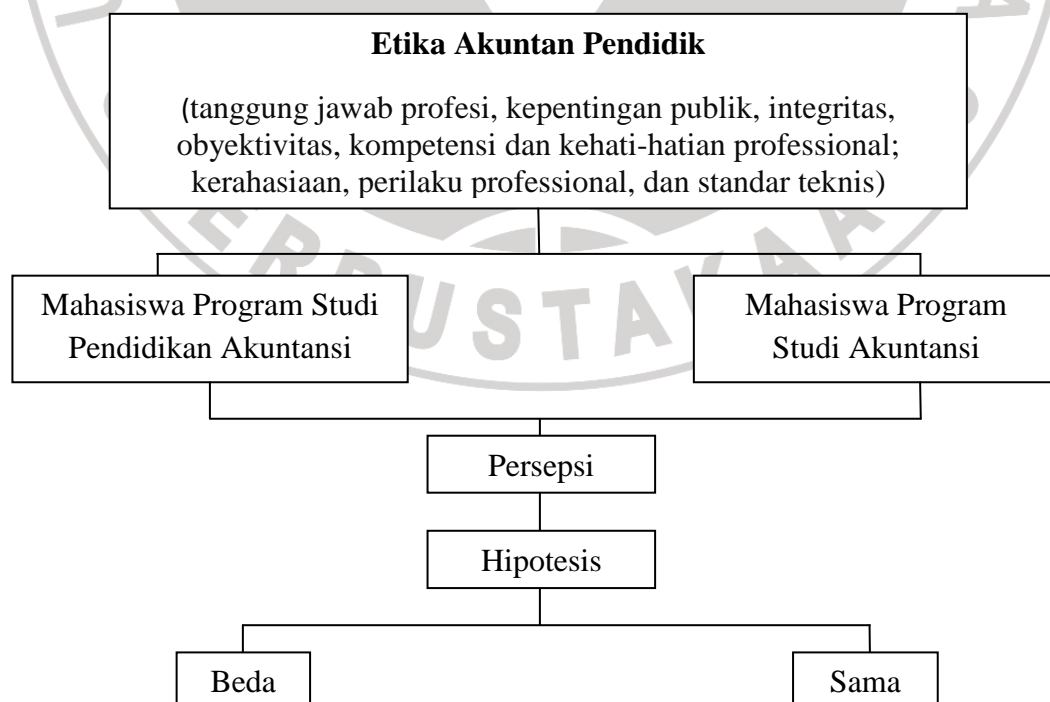
Dalam lampiran Keputusan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 171/Senat Akd./UPI-TU/V/2006 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan pada BAB I pasal 1 bahwasanya:

- 1) Program studi kependidikan adalah program studi yang mempersiapkan lulusannya untuk bekerja dalam bidang kependidikan sebagai guru atau non guru.
- 2) Program studi nonkependidikan adalah program studi yang mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di luar bidang pendidikan.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik pandangan bahwasanya mahasiswa Prodi Akuntansi telah dipersiapkan untuk menjadi akuntan, baik itu akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, ataupun lainnya di luar bidang pendidikan yang mana akan langsung diikat oleh kode etik akuntan. Sementara itu, mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi disiapkan untuk menjadi pendidik atau akuntan pendidik yang mana nantinya selain diikat oleh kode etik akuntan karena merupakan anggota IAI, mereka pun akan diikat oleh kode etik pendidikan yang menjunjung tinggi moral dan etika. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan

kurikulum dari kedua Prodi tersebut. Prodi Akuntansi hanya mempelajari mata kuliah keilmuan akuntansi, diantaranya mata kuliah etika bisnis dan profesi, dan mata kuliah audit 1 yang dapat dijadikan indikator pemahaman mahasiswa akan etika akuntan pendidik. Di sisi lain, Prodi Pendidikan Akuntansi, selain mempelajari keilmuan akuntansi terdapat pula ilmu kependidikan. Pada Prodi Pendidikan Akuntansi memang tidak terdapat mata kuliah etika bisnis dan profesi, akan tetapi banyaknya mata kuliah ilmu kependidikan yang sangat kental dengan nuansa moral dan etika menjadi indikator pemahaman mahasiswa terhadap etika akuntan pendidik.

Mencermati hal di atas, perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana persepsi terhadap persoalan-persoalan etika yang mungkin telah atau akan mereka hadapi apakah ada kesamaan atau perbedaan. Adapun kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat terlihat pada bagan berikut ini.



Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Berdasarkan pemaparan dari bagian latar belakang sampai bagian kerangka pemikiran mengenai perbedaan Prodi Akuntansi dengan Prodi Pendidikan Akuntansi, baik dari sisi *output* (lulusan) yang ingin dicapai, kurikulum, maupun dilihat dari mata kuliah yang dipelajari, maka hipotesis dari penelitian ini yakni **“terdapat perbedaan persepsi di antara mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi dengan mahasiswa Program Studi Akuntansi terhadap etika akuntan pendidik”**.

